

Judul : Defisit APBN Nyaris 3 Persen
Tanggal : Jumat, 07 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 17

Defisit APBN Nyaris 3 Persen

Pendapatan Turun Rp 36 Triliun, Belanja Naik Rp 30 Triliun

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mematok target defisit nyaris 3 persen terhadap produk domestik bruto pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2017. Pemerintah yakin target pendapatan hasil revisi akan terealisasi 100 persen dan pagu belanja hasil revisi terserap 98 persen. Alhasil, realisasi defisit 2,67 persen.

"Defisit RAPBN Perubahan 2017 diperkirakan 2,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Namun, dengan adanya penghematan alamiah pada belanja kementerian dan lembaga, dana alokasi khusus, dan dana desa, realisasi defisit diproyeksikan menjadi 2,67 persen terhadap PDB," kata Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR di Jakarta, Kamis (6/7).

Dalam kesempatan itu, Darmin hadir mewakili Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang sedang menghadiri pertemuan G-20 di Hamburg, Jerman. Pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2017 ditargetkan tuntas dan disahkan pada sidang paripurna DPR 27 Juli karena anggota DPR reses per 28 Juli.

Sidang dipimpin Ketua Banggar DPR dari Fraksi Partai Golkar Aziz Syamsuddin. Hadir pula Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Na-

POSTUR RAPBN-P 2017

Defisit RAPBN-P 2017 diperkirakan **2,92%** terhadap produk domestik bruto (PDB)

Namun, dengan adanya penghematan alamiah pada belanja K/L, DAK, dan Dana Desa, maka defisit menjadi **2,67%** terhadap PDB

APBN (Rp triliun)	2016	2017			
	APBN	RAPBN-P	Persentase terhadap APBN	"Outlook"	Persentase terhadap APBN
A. Pendapatan Negara	1.750,3	1.714,1	97,9	1.714,1	97,9
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.748,9	1.711,9	97,8	1.711,0	97,8
1. Penerimaan Perpajakan	1.498,9	1.450,9	96,8	1.450,9	96,8
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	250,0	260,1	104,0	260,1	104,0
II. Penerimaan Hibah	1,4	3,1	226,4	3,1	226,4
B. Belanja Negara	2.080,5	2.111,4	101,5	2.077,0	99,8
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.315,5	1.351,6	102,7	1.327,7	100,9
1. Belanja K/L	763,6	773,1	101,2	743,7	97,4
2. Belanja Non K/L	552,0	578,5	104,8	584,0	105,8
antara lain Subsidi	160,1	182,1	113,8	182,1	113,8
a. Subsidi Energi	77,3	103,1	133,4	103,1	133,4
b. Subsidi Non-energi	82,7	79,0	95,5	79,0	95,5
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	764,9	759,8	99,3	749,3	98,0
1. Transfer ke Daerah	704,9	699,8	99,3	691,1	98,0
2. Dana Desa	60,0	60,0	100,0	58,2	97,0
C. Keseimbangan Primer	109,0	178,0	163,4	144,3	132,4
D. Surplus/(Defisit) Anggaran (A-B)	330,2	397,2	120,3	362,9	109,9
Persentase Surplus/(Defisit) Anggaran terhadap PDB	2,41	2,92		2,67	
E. Pembiayaan Anggaran	330,2	397,2	120,3	362,9	109,9

Sumber: Kementerian Keuangan

INFOGRAFIK: ARDIANSYAH

sional Bambang PS Brodjonegoro dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo.

Batas maksimum

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit APBN, APBD, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pada Pasal 4 (1) menyebutkan, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3 persen dari PDB tahun bersangkutan.

Kementerian Keuangan sebelumnya telah menetapkan batas

maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 sebesar 0,3 persen. Dengan demikian, ruang defisit untuk APBN 2017 secara normatif maksimal 2,7 persen.

Sementara dalam RAPBN-P 2017, pemerintah menargetkan defisit Rp 397 triliun atau 2,92 persen terhadap PDB. Ini lebih besar dari target defisit APBN 2017 senilai Rp 330 triliun atau 2,41 persen. Pelebaran defisit disebabkan target pendapatan negara turun dari Rp 1.750 triliun ke Rp 1.714 triliun. Sementara pagu belanja negara naik dari Rp 2.080 triliun menjadi Rp 2.111 triliun.

Paparan pemerintah menyebutkan, semua target komponen pada pendapatan negara hasil revisi akan tercapai 100 persen. Target perpajakan direvisi turun, dari Rp 1.499 triliun ke Rp 1.451 triliun. Target penerimaan negara bukan pajak direvisi naik dari Rp 250 triliun ke Rp 260 triliun. Target penerimaan hibah direvisi naik dari Rp 1,4 triliun ke Rp 3,1 triliun.

Sementara pagu belanja negara hasil revisi diproyeksikan akan terserap 98,4 persen. Belanja pemerintah pusat membengkak Rp 36 triliun menjadi Rp 1.352 triliun. Penyerapannya

diperkirakan Rp 1.328 triliun. Transfer daerah dan dana desa juga diyakini tidak akan terserap 100 persen. Dari pagu hasil revisi senilai Rp 760 triliun, serapannya diperkirakan Rp 749 triliun.

Agus menyatakan, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini 5,0-5,4 persen. Dengan demikian, target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada RAPBN-P 2017 sejalan dengan prediksi BI.

"Ke depan BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan membaik dengan stabilitas ekonomi makro tetap terjaga," kata Agus. (LAS)